



**RUMAH UNTUK *WONG CILIK*:  
PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH LEMBAH KALI CODE  
YOGYAKARTA, 1983-2010**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:**

**ELLY RATNASARI**

**NIM 13030112120015**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Elly Ratnasari menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain; baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 23 Agustus 2019

Penulis,

Elly Ratnasari

NIM 13030112120015

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto:**

*“Tiada Doa yang Lebih Indah Selain Doa Agar Skripsi Ini Cepat Selesai”*  
-Penulis.

*“Kami Adalah Bunga yang Tak Kau Kehendaki Tumbuh, Engkau Lebih Suka  
Membangun Rumah dan Merampas Tanah”*

-Wiji Thukul

Dipersembahkan untuk:

Ibu, Bapak, dan Adik-Adik Tercinta.

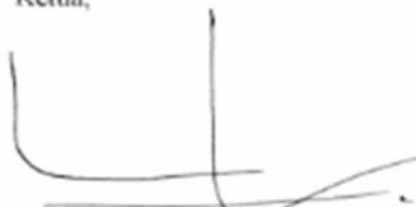
Disetujui,  
Dosen Pembimbing,



Mahendra P Utama, S.S., M. Hum.  
NIP 197102241999031001

Skripsi dengan judul “Rumah untuk *Wong Cilik*: Penataan Permukiman Kumuh Lembah Kali Code Yogyakarta, 1983-2010” yang disusun oleh Elly Ratnasari (NIM 13030112120015) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Jumat, 23 Agustus 2019.

Ketua,



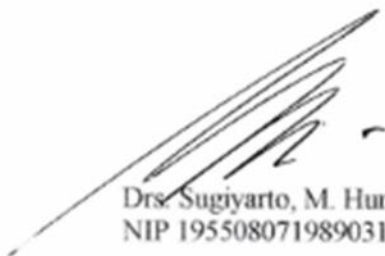
Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.  
NIP 196808291994031001

Anggota I,



Mahendra P Utama, S.S., M. Hum.  
NIP 197102241999031001

Anggota II,



Drs. Sugiyarto, M. Hum.  
NIP 195508071989031002

Anggota III,



Dr. Endah Sri Hartatik, M. Hum.  
NIP 196705281991032001

Mengesahkan,  
Dekan



Dr. Nurhayati, M. Hum.  
NIP 196610041990012001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis selalu diberi kemudahan dan keberkahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya atas kuasa dan kehendak-Nya, skripsi dengan judul “Rumah untuk *Wong Cilik*: Penataan Permukiman Kumuh Lembah Kali Code Yogyakarta, 1983-2010” dapat terselesaikan sebagai syarat utama untuk menyelesaikan studi pada Program Strata-1 pada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.

Ketertarikan penulis untuk membahas tentang kehidupan *wong cilik* di lembah Kali Code Yogyakarta serta ingin mengetahui lebih mendalam upaya yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan kumuh tersebut bertahan dari pesatnya perkembangan kehidupan di perkotaan. Rencana yang dilakukan pemerintah setempat untuk menggusur mereka. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui lebih mendalam usaha Romo Mangunwijaya serta tokoh-tokoh lain dalam mempertahankan dan menata permukiman tersebut sehingga mampu berkembang dan beradaptasi sampai sekarang, menjadi salah satu dari sekian alasan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai peneliti pemula, penulis tentu mendapat bantuan dari berbagai pihak; baik berupa bimbingan, nasihat, saran, maupun kritik. Penulis meyakini bahwa tanpa bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan mendukung penulisan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mahendra Puji Utama, S.S.,

M. Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, meminjamkan buku-buku sebagai tambahan referensi, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Mulyono, M. Hum., selaku dosen wali, yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap dosen penguji: Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., Dr. Sugiyarto, M. Hum., dan Dra. Endah Sri Hartatik, M. Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal. Secara khusus terima kasih penulis persembahkan kepada keluarga; Ibunda Atikah, atas segala doa dan kasih sayangnya demi mewujudkan mimpi dan cita-cita penulis. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda bapak Suwardi, atas segala kerja keras dan keringatnya mencari nafkah untuk anak-anaknya.

Selanjutnya, ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus saudara bagi penulis yang telah memberikan doa-doa dan dukungan; baik yang penulis ketahui maupun tidak. Terima kasih untuk sahabat dan kolega terdekat, Abdul Rahmad Nur Hidayat dan Sri Ayu Winda Novitasari.

Dukungan berupa sumber sangat diperlukan dalam penulisan sejarah. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Dinamika Edukasi Dasar Yogyakarta, Yogya Library Center, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan Perpustakaan Departemen Sejarah Undip. Dari lembaga-lembaga tersebut, penulis mendapatkan sumber baik berupa artikel dari majalah dan koran, literatur, maupun arsip yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Wahyaningsih, Ibu Soinah, Bapak Ariyanto, Bapak Totok Pratopo, Bapak Ahmad Basuki, dan Bapak H. Ahmad Badruwi yang sangat terbuka dalam memberikan segala informasi tentang kehidupan dan keadaan masyarakat Code baik sebelum

penataan atau setelah proses penataan. Terima kasih karena sudah bersedia direpotkan dan diangkat menjadi judul skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal tata tulis maupun substansi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan, sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Meskipun sedikit, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan.

Semarang, 23 Agustus 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	Ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xi
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvi
<b>ABSTRAK</b>	xviii
<b>ABSTRACT</b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	20
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	31
<b>BAB II LEMBAH CODE DAN MASYARAKAT URBAN DI YOGYAKARTA, 1980-1986</b>	32
A. Yogyakarta Pasca-Proklamasi Kemerdekaan	33
B. Gambaran Umum Kota Yogyakarta	39
1. Letak Geografis dan Batas Administratif	39
2. Kota Yogyakarta dan Penggunaan Lahan	41
3. Keadaan Penduduk	43
C. Masyarakat Urban Yogyakarta	45
D. Kampung Code Yogyakarta: Gambaran Kemiskinan Masyarakat Perkotaan	48
<b>BAB III MEMBANGUN BUKAN MENGGUSUR: PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI LEMBAH CODE YOGYAKARTA, 1983-1986</b>	57
A. Kebijakan Pemerintah Yogyakarta	58
1. Rencana Normalisasi Permukiman Lembah Kali Code	58
2. Geger Penggusuran Permukiman Kumuh di Lembah Kali Code Yogyakarta	61
B. Mangunwijaya Sang Inisiator	66

1. Genealogi dan Kehidupan Masa Kecil	66
2. Masa Pendidikan Formal	70
C. Rumah Warna-Warni: Penataan Permukiman Kumuh di Lembah Kali Code	75
1. Permukiman Kumuh di Lembah Kali Code	75
2. <i>Green Belt</i> : Ancaman Kaum Miskin Penghuni Permukiman Lembah Code	78
3. Penataan Permukiman Kumuh di Lembah Kali Code	82
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Penataan Permukiman Kumuh di Lembah Kali Code	87
1. Faktor Pendukung	89
2. Faktor Penghambat	
<b>BAB IV WAJAH BARU KALI CODE</b>	90
A. Lingkungan Fisik	92
1. Kondisi Permukiman Penduduk	92
2. Ruang Publik	98
B. Kehidupan Masyarakat	101
1. Perubahan Status Sosial Masyarakat	101
2. Perubahan Pandangan Pendidikan	103
C. Pemerti Code	105
1. Pendirian Pemerti Code	105
2. Program dan Kegiatan Pemerti Code	108
<b>BAB V SIMPULAN</b>	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	117
<b>DAFTAR INFORMAN</b>	122

## DAFTAR SINGKATAN

CBD	: Central Business District
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Jakti	: Jajasan Kredit Tani Indonesia
KB	: Keluarga Berencana
Kakanwil	: Kepala Kantor Wilayah
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
Liposos	: Lingkungan Pondok Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
MHT	: Muhammad Husni Tamrin
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PP	: Peraturan Pemerintah
PUKY	: Paguyuban Urusan Kematian Yogyakarta
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
ST	: Sekolah Teknik

Sekwilda	:	Sekretaris Kantor Wilayah
TK	:	Taman Kanak-Kanak
TRIP	:	Tentara Republik Indonesia Pelajar
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UU	:	Undang-Undang
VOTP	:	Vak Organisasi Tani Primair

## DAFTAR ISTILAH

- Aga Khan Award* : Penghargaan arsitektural yang digagas oleh Aga Khan IV pada tahun 1977.
- bregada* : Pasukan atau kelompok.
- black box* : Dalam arsitektur merupakan metode merancang berdasarkan inspirasi, yang proses kreatif dari suatu karya hanya diketahui oleh arsiteknya saja.
- genthong* : Hasil kerajinan dari tanah liat yang biasa digunakan masyarakat untuk mengambil air.
- green belt* : Ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan.
- ing madya mangun karsa* : Di tengah memberikan motivasi atau semangat
- ing ngarsa sung tuladha* : Di depan memberikan teladan atau contoh
- jaba benteng* : Tempat tinggal petugas keraton dalam bidang administrasi pemerintahan, prajurit serta tempat tinggal kaum bangsawan lainnya.
- jeron benteng* : Kawasan bagian dalam benteng yang mengelilingi Keraton Kasultanan Yogyakarta.
- matur nuwun* : Ungkapan terima kasih dalam dalam bahasa Jawa.
- memayu hayuning bawana* : Filosofi atau nilai luhur tentang kehidupan dari kebudayaan Jawa. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti memperindah keindahan dunia.
- Romo* : Gelar panggilan yang diberikan oleh umat Katholik kepada imam dalam Gereja Katholik.
- sepi ing pamrih rame ing gawe* : Peribahasa dalam bahasa Jawa yang berarti bekerja keras tanpa memiliki pamrih apapun.
- Slum* : Lingkungan permukiman yang absah, legal, dan permanen tetapi kondisi fisiknya kumuh dan semakin memburuk karena kurangnya pemeliharaan.

- squatter* : Lingkungan permukiman liar yang menempati lahan ilegal
- tirakatan* : Tradisi unik yang dapat ditemui di Jawa dan Bali sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan.
- Tut Wuri Handayani* : Di belakang memberikan dorongan.
- Wong cilik* : Sebutan atau istilah yang digunakan untuk membedakan status sosial dalam masyarakat Jawa.

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Wilayah Administratif Kota Yogyakarta	40
3.1	Romo Mangunwijaya bersama dengan anak-anak penghuni permukiman lembah kali code	65
3.2	Ibu Serafin Kamdanijah dan Yusuf Bilyarta Mangunwijaya usia 9 bulan	67
3.3	Bapak Yulianus Sumadi Mangunwijaya ketika menjadi guru di Scakelschool di Ambarawa tahun 1929-1933 beserta Ibu Serafin Kamdanijah dan dua anaknya tahun 1931.	68
3.4	Keluarga Bapak Sumadi tahun 1939 di Muntilan	70
3.5	Y.B. Mangunwijaya bersama dengan para siswa SD Bruder FIC kelas V di Muntilan tahun 1938-1939	71
3.6	Y.B. Mangunwijaya dan siswa kelas III SMA-B St. Albertus di Malang	72
3.7	Y.B. Mangunwijaya di Seminari Tinggi Santo Paulus Code Yogyakarta dari kiri ke kanan: Fr. Markiswo, Fr. Soebonokambi	73
3.8	Pentahbisan Rm. Y.B. Mangunwijaya pada 8 September 1959 di Gereja Bintaran Yogyakarta	74
3.9	Suasana perayaan Pentahbisan bersama dengan keluarga besar	75
3.10	Romo Mangunwijaya saat menyerahkan buku karangannya kepada meteri KLH Emil Salim	88
4.1	Permukiman Lembah Kali Code setelah ditata ulang oleh Romo Mangunwijaya tahun 1990	94
4.2	Piagam penghargaan <i>Aga Khan Award for Architecture</i>	95
4.3	Surat pernyataan penyerahan piagam penghargaan <i>Aga Khan Award for Architecture</i> kepada Romo Mangunwijaya	96
4.4	Salah satu sudut permukiman lembah kali Code setelah ditata oleh Romo Mangunwijaya	97
4.5	Balai warga yang dibangun oleh Romo Mangunwijaya tahun	99

1990

4.6	Perpustakaan di permukiman lembah kali Code yang dibangun oleh Romo Mangunwijaya	100
4.7	Anak-anak Code yang sedang bermain di taman bermain	101
4.8	Pengukuhan Pemerti Code pada 28 Juli 2008	107
4.9	Persiapan upacara adat Merti Code	110
4.10	Kerjasama Aksi Nol Sampah Masyarakat Code	111
4.11	Penyerahan komposter rumah tangga oleh MST FT UGM Dr. Ir. Ing. Agus Maryono untuk Kali Code	112
4.12	Walikota Yogyakarta H.Herry Zudianto turun langsung dalam kegiatan bersih sungai code	113



## **DAFTAR TABEL**

2.1	Luas dan Kecepatan Pemekaran Fisik Kota Yogyakarta Tahun 1956-1996	42
2.2	Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 1969-1999	44
2.4	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010	51

## ABSTRAK

Melalui metode sejarah, skripsi ini membahas tentang Rumah untuk *Wong Cilik*: Proses Penataan Permukiman Kumuh di Lembah Kali Code Yogyakarta, 1983 - 2010. Permukiman Code terletak di bawah jembatan Gondolayu Yogyakarta dari awal memang sudah terkenal sebagai daerah kumuh atau orang Yogyakarta menyebutnya sebagai daerah hitam. Oleh karena itu, pemerintah Yogyakarta memiliki rencana melakukan penggusuran, sehingga Code bebas dari permukiman penduduk.

Rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta pada tahun 1983 merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk menghilangkan citra kawasan kumuh permukiman Code yang letaknya berada dekat dengan pusat kota Yogyakarta. Namun demikian, rencana penggusuran tersebut tidak dengan mudah dilaksanakan. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau yang lebih akrab dikenal Romo Mangunwijaya, seorang budayawan, arsitek sekaligus rohaniawan Katholik dengan lantang menentang rencana penggusuran tersebut. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Romo Mangunwijaya dalam memperjuangkan permukiman kumuh di lembah Code. Sampai pada tahun 1986, pemerintah Yogyakarta memberikan kesempatan kepada Romo Mangunwijaya untuk memperbaiki dan menata permukiman kumuh yang letaknya di bawah jembatan Gondolayu Kota Yogyakarta.

Proses penataan permukiman kumuh di lembah Kali Code Yogyakarta dimulai pada tahun 1986, dengan menggunakan bahan bangunan yang disesuaikan dengan penghuni Code, Romo Mangunwijaya menggunakan bambu sebagai material utama bahan bangunan. Dibantu oleh beberapa rekan, orang-orang terdekat serta penduduk Code, Romo Mangunwijaya mengubah kawasan yang dahulu kumuh menjadi bangunan warna-warni. Konsep warna-warni pada dinding dan genteng rumah penduduk Code merupakan gambaran penduduk Code yang ceria dan ramah. Sampai pada tahun 1992, bangunan warna-warni tersebut mendapat sebuah penghargaan *Aga Khan Award*.

Namun demikian, pada tahun 1999, Romo Mangunwijaya meninggal dunia ketika mengisi sebuah acara seminar di Jakarta. Setelah kepergian Romo Mangunwijaya, muncul kesadaran dalam diri masyarakat Code untuk menjaga dan melestarikan sungai sehingga permukiman Code tetap nyaman untuk ditinggali seperti apa yang telah diajarkan oleh Romo Mangunwijaya. Pada tahun 2010, berdiri sebuah organisasi Pemerti Code dengan Totok Pratopo sebagai ketuanya. Tujuan organisasi ini adalah menjaga kelestarian Code. Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerti Code dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Yogyakarta.

## ***ABSTRACT***

By historical method, this thesis discusses about House of *Wong Cilik* (Ragtag): Slum Structuring Process in Kali Code Valley Yogyakarta, from 1983 to 2010. This research was carried out using historical research methods which includes four steps, such as heuristics, data criticism, interpretation, and historical writing. Code settlement which located under the Gondolayu bridge Yogyakarta from the beginning was already known as a slum or local people usually call it a black area. Therefore, Yogyakarta government were planning to do eviction, so that code could be free from residential settlements.

Eviction plan that would be carried out by government in 1983 was a step taken to eliminate slum image of Code settlement which located near the town (Yogyakarta). Those however, those plan was not easily implemented. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, familiarly known as Romo Mangunwijaya, a cultural observer, architect and Catholic clergyman had loudly opposed against those plan. There were many challenges faced by Romo Mangunwijaya to fight for slum's existence in Code valley. Until 1986, government trusted him to improve and arranging slum area which located under the Gondolayu bridge in Yogyakarta.

Process of structuring the slum were began in 1986, using building materials tailored to occupants of the Code, Romo Mangunwijaya used bamboo as the main material for building. Helped by several colleagues, closest and local people, Romo Mangunwijaya were changing the area that was once a slum into a colorful bulding. This colorful concept on the walls and roof of the resident's houses represented a description tha Code people are cheerful and friendly. Until 1992, those colorful building winning an *Aga Khan Award*.

However, in 1999, Romo Mangunwijaya passed away while attending a seminar as a speaker in Jakarta. After that, Code people awareness appeared to maintain and preserve the river so Code settlements would remain comfortable to live in as taught by Romo Mangunwijaya. So that in 2010, standing Pemerti Code organization with Totok Pratopo as its leader. The focus of organization is to maintain sustainability of the Code. So that it becomes a comfortable settlement for those who live in it.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Kota menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi karena menjadi pusat aktivitas ekonomi. Ketersediaan lowongan pekerjaan yang cukup banyak di kota menjadi salah satu faktor penarik bagi para pendatang yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan harapan akan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Bertambahnya pendatang yang masuk dan memutuskan untuk menetap di kota berbanding lurus dengan peningkatan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kebutuhan rumah atau pemukiman.

Keterbatasan lahan di perkotaan tentu menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi tempat tinggal. Para pekerja memilih tempat tinggal yang cenderung dekat dengan tempat mereka bekerja. Pemilihan lokasi tempat tinggal juga sangat dipengaruhi oleh harga dan lahan lokasi, yaitu harga yang murah dan lahan yang dekat dengan lokasi tempat kerja. Kualitas pemukiman tidak lagi diperhatikan karena sebagian besar jarak adalah hal yang paling diutamakan. Masyarakat akan mulai mendirikan permukiman dengan tidak mementingkan kualitas tempat tinggal, seperti tersedianya infrastruktur dasar permukiman serta tingkat keamanan dari bahaya bencana.

Alasan pemilihan lokasi dengan harga yang murah menjadi penyebab muncul dan pertumbuhan permukiman di lahan-lahan marginal, misalnya di bantaran sungai. Permukiman di bantaran sungai biasanya identik dengan *slum* dan *squatter*.<sup>1</sup> Di perkotaan, permukiman di bantaran sungai telah tumbuh dan

---

<sup>1</sup>*Slum* adalah lingkungan pemukiman yang absah, legal, dan permanen tetapi kondisi fisiknya kumuh dan semakin memburuk karena kurang pemeliharaan. *Squatter* adalah lingkungan pemukiman liar yang menempati lahan ilegal, bukan daerah pemukiman dengan kondisi fisik yang jelek tanpa dilayani sarana dan prasarana lingkungan kota. Mohammad Agung Ridlo, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Semarang: Unissula Press, 2001), hlm. 23-24.

berkembang karena ketersediaan sungai sebagai sumber daya, lahan yang murah, dan akses yang dekat dengan pusat aktivitas sosial dan ekonomi.

Permukiman kumuh dan permukiman liar merupakan contoh permasalahan yang dihadapi kota besar di Indonesia. Kedua permasalahan tersebut tidak terlepas dari proses pembangunan kota. Kebutuhan lahan yang semakin meningkat dan akses lahan yang terbatas menjadikan penduduk dengan tingkat ekonomi rendah akan memilih tempat tinggal dengan harga yang relatif murah. Bantaran sungai adalah salah satu wilayah yang menyediakan harga murah dengan akses dekat kota dan pusat kegiatan ekonomi maupun sosial. Gambaran kemiskinan akan selalu tampak pada permukiman kumuh dan liar, baik kemiskinan tempat maupun kemiskinan sosial. Sebutan kemiskinan tempat mengacu pada kondisinya sebagai tempat tinggal yang tidak manusiawi berupa gubuk-gubuk yang tidak teratur, saling berdesakan, terbuat dari bahan bekas seperti kardus, seng bekas, plastik, karton, dan sisa buangan bangunan.<sup>2</sup>

Yogyakarta sebagai kota yang dinamis dan berkembang, juga memiliki kawasan yang kumuh. Kawasan permukiman kumuh di Yogyakarta secara umum berasosiasi dengan keberadaan sungai, yaitu di bantaran Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong.<sup>3</sup> Yogyakarta memiliki kawasan *Central Business District* (CBD) yang berada di sekitar kawasan Malioboro dan didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Zona permukiman kelas bawah dapat diidentifikasi di bantaran Sungai Code yang berbatasan langsung dengan kawasan Malioboro.

Sungai Code yang membelah kota Yogyakarta menjadi dua memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat yang tempat tinggalnya dilalui oleh sungai ini. Sumber mata air Sungai Code berasal dari kaki Gunung Merapi yang biasa digunakan oleh penduduk setempat untuk

---

<sup>2</sup>Ridlo, *Kemiskinan di Perkotaan*, hlm. 21.

<sup>3</sup>Dyah Rahmawati Hizbaron dan Surani Hasanati, *Menuju Kota Tangguh di Sungai Code Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016) hlm. 6.

pengairan lahan sawah serta sebagai sumber air minum.<sup>4</sup> Sumber mata air yang berasal dari kaki Gunung Merapi yang menjadi penyebab sering terjadinya bencana seperti banjir lahar dingin yang tentu berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Sungai Code.

Permukiman di kawasan bantaran lembah Kali Code merupakan salah satu kawasan permukiman yang padat, baik padat penduduk maupun padat bangunan. Keterbatasan akses penduduk dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal menjadi salah satu faktor penduduk memilih bermukim di bantaran lembah Kali Code, serta jaraknya yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan perekonomian di perkotaan dan harga lahan yang rendah. Tingkat kepadatan pemukiman di lembah Kali Code tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap Kali Code dan lingkungannya. Salah satunya, yaitu limbah dan sampah rumah tangga yang dapat memberikan dampak negatif bagi sungai jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keberadaan permukiman yang padat tentu juga membutuhkan adanya infrastruktur pelayanan pendukung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur persampahan, infrastruktur pengolahan limbah dan lain-lain.

Perekonomian yang tergolong dalam kelas ekonomi paling bawah juga menjadi salah satu permasalahan bagi sebagian besar penduduk di kawasan permukiman lembah Kali Code. Kawasan permukiman Code sebelum ada pihak yang menyentuh mendapat sebutan sebagai daerah hitam yang ditinggali oleh *wong cilik* atau orang-orang yang kelas ekonominya berada di titik rendah. Mereka adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pengepul sampah. Dilihat dari segi politik dan sosial, *wong cilik* yang tinggal di permukiman lembah Kali Code juga merupakan kelompok yang terpinggirkan. Keberadaannya dianggap mengganggu keindahan kota. Penduduk baik-baik akan segan melewati daerah permukiman Code atau orang Yogyakarta menyebutnya sebagai Ledok Code. Permukiman lembah Code adalah tempat pembuangan sampah yang tidak karuan, tempat

---

<sup>4</sup>Hizbaron, dkk., *Menuju Kota Tangguh di Sungai Code Yogyakarta*, hlm. v.

berkumpulnya para pengepul barang bekas sekaligus mendirikan tempat tinggal yang menetap di daerah lembah Kali Code.<sup>5</sup>

Antara tahun 1979-1981, di sepanjang lembah Kali Code masih banyak rumah kardus beratap triplek yang merupakan tempat tinggal masyarakat di kawasan tersebut. Apabila menjelang kedatangan tamu dari luar Kota Yogyakarta, rumah-rumah tersebut tidak akan pernah luput dari aksi-aksi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan tujuan agar tidak mengganggu pemandangan di sepanjang bawah kolong jembatan Gondolayu.

Masyarakat yang tinggal di kawasan lembah Code merupakan gambaran kemiskinan di perkotaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1983 pemerintah Yogyakarta membuat kebijakan bahwa lembah Code akan dibebaskan dari permukiman. Pemerintah beralasan bahwa lembah Code bukanlah tempat yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Banyak sekali alasan yang dibuat dan disusul dengan berita di surat kabar tentang alasan-alasan yang rasional. Termasuk salah satunya menandakan bahaya banjir apabila musim penghujan datang. Rencana pembebasan lembah Code dari permukiman ternyata mendapat penolakan dari Romo Mangunwijaya. Ia menginginkan masyarakat Code bisa tetap tinggal di wilayah permukiman yang sudah lama mereka tempati.<sup>6</sup>

Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau lebih akrab disapa Romo Mangunwijaya adalah seorang rohaniawan Katolik, budayawan sekaligus arsitek yang pada waktu itu muncul dan membela masyarakat yang tinggal di kawasan Kali Code untuk bisa tetap tinggal tanpa adanya bayang-bayang penggusuran permukiman. Pada 1983, Romo Mangunwijaya meminta izin kepada Romo Kardinal Darmoyuwono untuk berkarya di tengah kaum miskin yang berada di kawasan Code. Perjuangan Romo Mangunwijaya pada 1983 untuk membebaskan permukiman lembah Kali Code dari rencana penggusuran pemerintah dilanjutkan

---

<sup>5</sup>Lies H, Sentuhan-Sentuhan Romo dan Ledok Terban, *Gereja dan Teologi XII*, hlm. 2.

<sup>6</sup>Agus Edy Santoso, "Dibalik Penggusuran Kali Code: Antara Munculnya Kesadaran Kelas dan Ideologi Pancasila", *Eksponen*, April 1986, hlm. 6.

dengan terjun langsung dan berkarya bersama masyarakat lembah Kali Code selama tiga tahun, yaitu antara tahun 1983 sampai 1986 untuk menata permukiman kumuh lembah Kali Code.<sup>7</sup>

Romo Mangunwijaya bersama masyarakat Code dengan menggunakan bambu sebagai material dasar bahan bangunan mendirikan gubuk yang sampai saat ini ditinggali oleh penduduk Code. Sebelum dan selama proses penataan terdapat berbagai faktor yang mendukung dan menghambat proses penataan permukiman Code. Usaha Romo Mangunwijaya untuk menata permukiman kumuh lembah Code akhirnya berhasil. Pada 1986, permukiman penduduk yang semula kumuh dan tidak karuan menjadi lebih tertata.

Akan tetapi di balik keberhasilan Romo Mangunwijaya melakukan penataan permukiman lembah Code, ada tokoh yang menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Romo Mangunwijaya untuk penduduk Code merupakan sebuah usaha untuk melakukan kristenisasi penduduk yang tinggal di permukiman lembah Code. Meskipun demikian, tidak ada penduduk Code yang merasa bahwa apa yang dilakukan Romo Mangunwijaya merupakan usaha untuk mengkristenkan penduduk Code.<sup>8</sup> Romo Mangunwijaya juga mendapat berbagai apresiasi dan dukungan dari pejabat pemerintah. Emil Salim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sangat mengapresiasi usaha Romo Mangunwijaya atas perjuangannya mendampingi dan menata permukiman Code sehingga lebih layak untuk ditinggali.

Pada 1992, Romo Mangunwijaya mendapatkan Aga Khan Award yaitu sebuah penghargaan internasional di bidang arsitektur untuk hasil karyanya di tepi Kali Code.<sup>9</sup> Sepeninggal Romo Mangunwijaya pada tahun 1999, penduduk Code yang tinggal di permukiman tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Pemerti Code yang diresmikan pada 28 Juni 2008 dengan Totok Pratopo

---

<sup>7</sup>Y.B. Mangunwijaya, dalam “At The Oriental Bangkok”, Bangkok, 26 Oktober 1983.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sri Wahyaningsih (Salah Satu Orang Terdekat Romo Mangunwijaya Ketika Mendampingi Masyarakat Code) pada 8 Juli 2018.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Sri Wahyaningsih pada 8 Juli 2018.



sebagai ketuanya.<sup>10</sup> Pemerti Code sendiri merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian Kali Code sehingga Code akan tetap menjadi permukiman yang nyaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selang waktu dua tahun, pada 2010 anggota Pemerti Code melakukan sebuah kegiatan kerja bakti membersihkan Code dan berhasil memecahkan Rekor MURI sebagai bersih sungai terpanjang pada tahun tersebut.<sup>11</sup>

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, skripsi ini akan membahas permasalahan tentang penataan permukiman kumuh di lembah Kali Code serta pemeliharaan lingkungannya sebagai permukiman *wong cilik* dalam periode 1983 sampai 2010. Beberapa pertanyaan akan dijawab dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi lembah Kali Code dijadikan bagi pilihan *wong cilik* untuk bermukim di Yogyakarta?
2. Bagaimana proses penataan permukiman kumuh di lembah Kali Code tahun 1983-1986?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses penataan permukiman di lembah Kali Code?
4. Bagaimana kondisi permukiman di lembah Code dan kehidupan masyarakatnya setelah penataan, 1986-2010?

## **B. Ruang Lingkup**

Dalam pembahasan suatu karya ilmiah, ruang lingkup mutlak diperlukan. Mengingat luasnya masalah dalam kehidupan masyarakat maka sudah sewajarnya apabila dibatasi sesuai dengan topik yang diangkat. Atas dasar itu sangat

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Totok Pratopo (Ketua Pemerti Code) pada 25 Januari 2019.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Totok Pratopo pada 25 Januari 2019.

dibutuhkan adanya ruang lingkup, yang akan membantu agar penulis tidak terjerumus ke dalam pembahasan yang tidak terfokus.<sup>12</sup>

Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batasan-batasan agar diperoleh kejelasan pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud adalah ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup keilmuan. Menurut Taufik Abdullah, penentuan ruang lingkup yang terbatas dalam suatu studi sejarah bukan saja lebih praktis dan mempunyai kemungkinan dikaji secara empiris, namun juga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.<sup>13</sup>

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dipilih dalam penelitian. Batasan waktu sangat tergantung pada sifat peristiwa atau fenomena yang diteliti. Pembatasan lingkup temporal ini bertujuan agar penulis lebih fokus dalam penelitian, sehingga tidak melewati tahun yang telah ditetapkan. Peristiwa yang berlangsung singkat dan mengendap menjadi peristiwa masa lampau dapat dijadikan lingkup waktu.<sup>14</sup>

Lingkup temporal skripsi ini antara tahun 1983-2010. Tahun 1983 dijadikan sebagai pembahasan awal dengan pemikiran bahwa pada tahun tersebut pemerintah Kota Yogyakarta berencana untuk melakukan normalisasi permukiman Code dan membebaskan lembah Code dari hal-hal yang oleh pemerintah Kota Yogyakarta dianggap merusak pemandangan. Tahun 2010 dijadikan sebagai batas akhir pembahasan berdasar pemikiran bahwa permukiman di kawasan bantaran kali Code menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Pada 2010 berdiri organisasi Pemerti Code. Pemerti Code adalah bentuk dari aspirasi masyarakat yang ingin melihat Code

---

<sup>12</sup>Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat, ed., *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 17.

<sup>13</sup>Taufik Abdullah, "Di Sekitar Sejarah Lokal di Indonesia" dalam *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 10.

<sup>14</sup>Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah* (Semarang: Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNDIP, 2018), hlm. 19.

tetap menjadi daerah yang layak untuk ditinggali dan sekaligus sebagai organisasi yang memperhatikan Kali Code agar bebas dari pencemaran sehingga Code tetap bersih dan nyaman. Sejak berdiri pada 2008 sampai dengan 2010, Pemerti Code telah cukup melakukan banyak kegiatan. Waktu selama dua tahun dipandang cukup untuk melihat usaha Pemerti Code mencapai tujuannya.

Ruang lingkup spasial merupakan suatu batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau satuan wilayah administratif tertentu yang bisa meliputi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Batas spasial dalam kajian ini adalah kota Yogyakarta. Letak Kali Code yang ditata secara administratif merupakan bagian dari Kelurahan Kotabaru.<sup>15</sup> Namun demikian, provinsi yang berkaitan dengan penataan permukiman lembah Code merupakan urusan dan bagian dari wilayah pemerintah Kota Yogyakarta.

Ruang lingkup yang terakhir ialah ruang lingkup keilmuan. Secara keilmuan, skripsi ini dapat dikategorikan sebagai sejarah sosial, mengacu pada tema skripsi tentang kemiskinan masyarakat yang tinggal di kawasan wilayah Code. Tema-tema seperti kemiskinan, perbanditan, kekerasan dan kriminalitas dapat digolongkan sebagai sebuah sejarah sosial karena sejarah sosial menjadikan masyarakat sebagai bahan kajiannya.<sup>16</sup>

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada latar belakang permasalahan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan lembah Kali Code sebagai tujuan pemukiman *wong cilik* di Yogyakarta.
2. Menjelaskan proses penataan lembah Kali Code tahun 1983-1986.
3. Menjelaskan faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penataan pemukiman lembah Kali Code.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ari (Anggota Pemerti Code Untuk Wilayah Ledok Terban) pada 25 Januari 2019.

<sup>16</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hlm. 42.

4. Menjelaskan kondisi pemukiman dan lingkungan masyarakat di lembah Kali Code setelah penataan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, diperlukan pustaka-pustaka yang dapat membantu penulis dalam memahami masalah yang diteliti secara mendalam. Kaitannya dengan penulisan sejarah, hasil penelitian atau pemikiran peneliti terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sangat diperlukan untuk menggambarkan situasi yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Selain itu, juga dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam setiap pembahasan. Kajian ini tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sumber-sumber pustaka terkait yang memiliki kesamaan analisis untuk dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Pustaka memiliki kegunaan yang sangat penting dalam penelitian karena memiliki beberapa fungsi di antaranya: memperdalam masalah yang hendak diteliti, menegaskan kerangka konseptual yang akan dijadikan landasan pemikiran, dan mempertajam konsep yang digunakan supaya memudahkan dalam merumuskan hipotesa.

Buku pertama, adalah karya Parsudi Suparlan yang berjudul *Kemiskinan di Perkotaan*.<sup>17</sup> Secara garis besar buku ini membahas tentang gambaran kemiskinan di perkotaan. Buku ini juga menjelaskan tentang pengertian kebudayaan kemiskinan. Kebudayaan kemiskinan merupakan bentuk adaptasi atau penyesuaian. Sekaligus merupakan suatu reaksi masyarakat miskin terhadap kedudukan mereka sebagai kaum marginal dalam kehidupan masyarakat yang berstrata sosial, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme.<sup>18</sup>

Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu cermin upaya mengatasi rasa putus asa dan tidak memiliki harapan. Masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan mempunyai sikap yang kritis terhadap beberapa pranata dasar yang

---

<sup>17</sup>Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).

<sup>18</sup>Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, hlm. 5.

didominasi oleh kelas yang berkuasa. Mereka cenderung benci terhadap polisi, tidak percaya kepada pemerintah atau mereka yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Keadaan tersebut berpotensi tinggi bagi munculnya suatu protes dan untuk digunakan dalam gerakan-gerakan yang bertujuan menentang ketentuan-ketentuan sosial yang ada.

Kebudayaan kemiskinan menunjuk pada adanya suatu cara hidup yang secara bersama dialami dan dilakukan oleh orang-orang miskin dalam suatu konteks sejarah dan sosial tertentu. Ketika orang miskin mempunyai kesadaran kelas atau menjadi bagian yang aktif dalam organisasi-organisasi buruh atau menganut suatu pandangan internasional, mereka bukan lagi termasuk bagian dari yang berkebudayaan kemiskinan meski kondisi mereka masih tetap melarat.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap manusia. Secara singkat, kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah secara langsung tampak pada tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.<sup>19</sup> Masalah di perkotaan, khususnya masalah kemiskinan di perkotaan, adalah karena kedudukan kota-kota dalam masyarakat negara tersusun dalam suatu jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan atau pendorinasian bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan warga negara.

Dalam kehidupan masyarakat di dunia, manusia cenderung untuk berorientasi ke kota, atau dengan kata lain, orang desalah yang berorientasi ke kota dan bukan orang kota yang berorientasi ke desa. Kota cenderung untuk tumbuh terus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari desa atau dari luar kota-kota dan tempat lainnya.

---

<sup>19</sup>Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, hlm. xi.

Daerah di perkotaan apabila dibandingkan dengan daerah di pedesaan lebih banyak alternatif untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Walaupun alternatif untuk memperoleh pekerjaan lebih terbuka di daerah perkotaan daripada di desa, namun kemiskinan di kota tetap ada atau laten karena potensi-potensi yang ada (lingkungan fisik dan alam, sistem sosial dan kebudayaan), tidak atau belum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan alternatif baru yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah bagi sebagian besar warga atau penduduknya.

Derasnya arus perpindahan penduduk ke kota menimbulkan berbagai masalah baru di perkotaan. Masalah menjadi semakin rumit karena kenyataan bahwa arus kaum pemukim berbondong-bondong masuk ke kota lebih cepat dari kesanggupan industri untuk menampung tenaga kerja. Arus manusia yang semakin meningkat jumlahnya, yang ramai-ramai membanjiri kota tentu berdampak juga kepada peningkatan kebutuhan akan rumah. Umumnya kaum pemukim yang datang ke kota tidak memiliki ketrampilan yang memadai dan sering menjalani kehidupan marjinal di perkotaan. Sebagai akibatnya yaitu orang tersebut akan tidur di jalanan, timbul perkampungan kumuh dan tempat-tempat dengan kepadatan penduduk yang berlebihan, pemukiman liar, sehingga akan menjadikan kesan kesengsaraan manusia di kota yang sedang berkembang.

Penyediaan tanah dan rumah guna menampung kaum pendatang baru di kota yang menjadi tujuan, semua ini menimbulkan masalah yaitu semakin merajalelanya kampung-kampung miskin dan daerah penghuni gubuk-gubuk liar. Kota-kota unggul atau *primate cities* tersebut mendominasi negeri yang bersangkutan, dan merupakan daya tarik utama kaum pengembara dari daerah-daerah pedalaman yang datang untuk menarik becak, untuk menjadi buruh dan lain sebagainya.

Akan tetapi, kaum pengembara tersebut mengalami masalah yaitu bahwa tanah yang dekat dengan tempat mereka mencari nafkah adalah tanah milik orang kaya dan bagaimanapun juga harga sewa dan beli terlalu mahal yang kemudian memaksa mereka untuk mendirikan bangunan dengan model dan bahan seadanya. Ciri-ciri sosial dan ekonomi dari orang-orang yang hidup di perkampungan miskin

di perkotaan serta penduduk kampung miskin dan liar di perkotaan pada umumnya adalah terdiri dari pendatang-pendatang terakhir dari desa-desa dan merupakan golongan termiskin penduduk kota. Akan tetapi, mereka adalah otot dari perkotaan, yakni kuli bangunan, tukang becak, dan buruh kasar yang membuat perekonomian di kota bisa berjalan terus.

Masalah pokok di kampung-kampung miskin di perkotaan dan daerah-daerah penghuni gubuk liar adalah bagaimana sikap utama pemerintah terhadap daerah-daerah seperti itu. Pada kenyataannya sikap utama pemerintah dari negara yang bersangkutan adalah acuh tak acuh, walaupun bukan terang-terangan bermusuhan terhadap daerah tersebut, khususnya mengenai masalah penghunian liar yang sensitif tersebut. Kebanyakan pejabat yang berwenang, mengambil kebijakan menganggap daerah-daerah tersebut membahayakan kesehatan dan sebagai noda yang harus dihapus.

Buku kedua, adalah *Menuju Kota Tangguh di Sungai Code Yogyakarta*, yang ditulis oleh Dyah Rahmawati Hizbaron dan Surani Hasanati.<sup>20</sup> Buku ini fokus menjelaskan bagaimana kondisi permukiman Kali Code Yogyakarta. Kali Code merupakan salah satu kali terbesar di Yogyakarta yang memiliki peranan penting bagi masyarakat Yogyakarta. Sungai ini juga membelah Yogyakarta menjadi dua. Sumber air kali Code berasal dari kaki Gunung Merapi yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah dan bahkan digunakan sebagai sumber air minum. Akan tetapi, karena sumber airnya yang berasal dari kaki Gunung Merapi, Kali Code sering terdampak bencana, seperti contohnya yaitu banjir lahar dingin. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi masyarakat. Selain itu, di dalam buku ini juga dijelaskan secara integratif permasalahan yang ada di sekitar Kali Code. Contohnya yaitu permukiman kumuh, pengelolaan lingkungan sungai serta pengelolaan bencana di bantaran Kali Code. Konsisten dengan permasalahan skripsi yang dibahas oleh penulis yang fokus permasalahan berada di wilayah Code di bawah jembatan Gondolayu Kelurahan Kotabaru.

---

<sup>20</sup>Dyah Rahmawati Hizbaron, dkk., *Menuju Kota Tangguh di Sungai Code Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

Pustaka ketiga, adalah buku karya Selo Soemardjan yang berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta*.<sup>21</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Jawa Tengah sebelah selatan. Dua sungai utama, yakni Kali Progo dan Kali Opak, mengalir sejajar dari utara ke selatan, merupakan sumber air irigasi untuk persawahan. Sungai lainnya, Kali Oyo, membelah sudut timur-laut wilayah, dan bersatu dengan Kali Opak beberapa mil sebelum keduanya masuk Samudera Hindia.

Yogyakarta disebut sebagai daerah Istimewa dalam Republik Indonesia karena pada mulanya merupakan daerah berpemerintahan sendiri (swapraja) pada zaman Belanda dan Jepang. Kedudukan istimewa Yogyakarta diakui secara tegas oleh pemerintah Republik Indonesia semenjak permulaan revolusi nasional Indonesia. Pokok persoalan buku ini adalah mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Yogyakarta, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk yaitu nilai sosial, sikap dan pola tingkah laku antarkelompok dalam masyarakat. Sumber-sumber pokok dari perubahan sosial terletak dalam lingkup biologi, teknologi, dan ideologi masyarakat. Dalam buku ini pokok persoalan adalah perubahan sosial yang berasal dari perubahan-perubahan ideologi politik dasar masyarakat Jawa di Yogyakarta. Penting sekali untuk mengetahui siapa pelopor dari perubahan tersebut.

Perubahan-perubahan politik dan pemerintahan di Yogyakarta dalam buku ini dilukiskan oleh Sultan Yogyakarta atau oleh pemerintah provinsi di bawah bimbingannya. Dalam hal ini mereka dapat dipandang sebagai pelopor dari perubahan-perubahan. Perubahan sosial yang telah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta semenjak akhir masa penjajahan Belanda bisa dibagi dalam dua kategori yaitu perubahan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Perubahan disengaja adalah perubahan yang telah diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh para anggota masyarakat yang berperan sebagai pelopor perubahan.

---

<sup>21</sup>Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotinggi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981).



Perubahan yang tidak disengaja adalah perubahan yang terjadi tanpa adanya rencana sebelumnya dari anggota masyarakat. Perubahan pemerintahan di Yogyakarta dimulai pada masa pendudukan Jepang dan kemudian saat revolusi di pelopori oleh Sultan. Sri Sultan sebagai penguasa tradisional yang aristokratis dan absolut akan terkena dari dampak yang menuju kearah demokrasi. Secara harfiah, dia harus menyerahkan kekuasaan absolutnya yaitu bukan menjadi penguasa para warganya tetapi melainkan hanya menjadi abdi mereka.

Perubahan dari sistem kelas tertutup menjadi sistem kelas yang terbuka setelah revolusi nasional membuat rakyat sadar. Hal ini sangat terlihat pada orang-orang yang berada di kalangan kelas bawah. Perubahan dalam sistem kelas juga menimbulkan kecenderungan yang kuat pada masyarakat desa untuk memperluas ruang lingkungannya. Berkembangnya pengetahuan dari berbagai cara untuk mencapai sukses menjadikan individu untuk menanjak pada kedudukan yang lebih tinggi di dalam kehidupan masyarakat.

Berawal dari perubahan sosial dan pembangunana ekonomi yaitu kedudukan petani di Yogyakarta dalam hubungannya dengan masyarakat dan pemerintah dapat disimpulkan sebelum adanya perubahan hukum tanah pada tahun 1918 petani hanya memiliki kewajiban dan tidak mempunyai hak. Sejak penghapusan pajak tanah tahun 1951 mereka hanya mempunyai hak dan tidak memiliki kewajiban.

Perubahan hukum tanah membawa banyak perubahan penting dalam organisasi sosial penduduk pedesaan. Saat masih berlaku sistem tanah lungguh, kawula Sultan tidak mempunyai perasaan terikat pada tanah. Mereka mengetahui bahwa mereka bisa tinggal selama mereka sanggup melaksanakan tugas dan bahwa mereka juga bisa diusir setiap saat. Tidak ada rangsangan untuk tinggal di satu tempat, oleh karena itu perpindahan penduduk di daerah pedesaan cukup tinggi.

Pustaka keempat adalah artikel karya Niken Fitria dan Rulli Setiawan yang berjudul “Identifikasi Karakteristik Pemukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk,

Jakarta Barat”.<sup>22</sup> Artikel ini menjelaskan tentang kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Tahapan identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di masing-masing tingkat kekumuhan yang terdapat di Kelurahan Kapuk menggunakan teknik statistikal deskriptif. Setelah itu diperoleh beberapa karakteristik pemukiman kumuh di tempat penelitian ditinjau dari aspek, yaitu kondisi fisik, ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana, sosial dan bahaya.

Mengacu pada karakteristik tersebut kemudian dijelaskan karakteristik permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang dan permukiman kumuh berat. Permukiman kumuh ringan memiliki karakteristik yaitu tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat sudah baik. Hanya saja ada sarana dan prasarana yang kurang memadai dan dianggap kurang baik yaitu dari sistem drainase dan sanitasi. Masyarakat yang tinggal di kawasan Kelurahan Kapuk sebagian besar adalah para pendatang dari berbagai daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk daerah.

Dilihat dari segi fisik atau bangunan tempat tinggal memiliki kesamaan, yaitu konstruksi bangunan semipermanen. Aspek ekonomi sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh. Penghasilan sebulan berkisar antara Rp 2.100.000,- sampai dengan 2.500.000,-. Ditinjau dari aspek bahaya daerah di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat merupakan daerah yang rawan banjir. Akan tetapi, kondisi genangan air masih rendah jika dibandingkan dengan permukiman kumuh tingkat berat.

Selanjutnya yaitu permukiman kumuh sedang. Permukiman kumuh sedang memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan karakteristik permukiman kumuh ringan. Hanya saja berbeda dari segi sosial dan ekonomi. Dari segi sosial masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh sedang adalah seimbang antara pendatang dengan penduduk asli Jakarta. Namun demikian, untuk aspek

---

<sup>22</sup>Fitria Niken dan Setiawan Rulli, “Identifikasi Karakteristik Pemukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat”, *Jurnal Teknik POMITS*, Vol. 3, No. 2, 2014, (<https://media.neliti.com/media/publications/194626-ID-identifikasi-karakteristik-lingkungan-pe.pdf> (diunduh pada 23 Juli 2018), hlm. 1-5.

ekonomi sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dengan tingkat pendapatan kurang lebih hampir sama dengan pendapatan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ringan.

Terakhir adalah permukiman kumuh berat. Kategori permukiman kumuh berat dilihat dari segi sarana dan prasarana memang lebih buruk dibandingkan dengan kedua permukiman kumuh ringan dan sedang. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki tempat pembuangan sampah sendiri sehingga banyak dari masyarakat yang membuang sampah dengan menimbunya di tanah-tanah kosong dekat dengan permukiman. Namun demikian, untuk sanitasi masyarakat sudah memiliki jamban dan kamar mandi sendiri meskipun kondisinya buruk dan kotor.

Aspek fisiknya bangunan tempat tinggal mereka didominasi oleh bangunan semipermanen tetapi kondisinya masih buruk. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sini adalah sebagian besar mereka para pendatang, tetapi karena sudah menetap lama selama bertahun-tahun mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk Jakarta. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai tukang sapu, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, tukang ojek dan lain sebagainya dengan tingkat pendapatan kisaran per bulan Rp 1.100.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,-. Ditinjau dari aspek bahaya, tingkat bahaya di permukiman kumuh berat ini lebih tinggi dibanding dengan permukiman kumuh rendah dan sedang. Genangan banjir bisa terjadi setiap tahun apabila musim penghujan datang dengan tingkat ketinggian air bisa mencapai 1 meter bahkan lebih.

Pustaka kelima, yaitu artikel karya Nursyahbani Raisa dan Bitti Pigawati yang berjudul “Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)”.<sup>23</sup> Artikel ini menjelaskan tentang karakteristik kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Kampung Gandekan Semarang dan tingkat kekumuhannya. Penghuni permukiman kumuh

---

<sup>23</sup>Nursyahbani Raisa dan Bitti Pigawati, “Kajian Karakteristik Permukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)”, *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 4 Nomor 2, 2015 (<https://www.neliti.com/id/publications/214472/kajian-karakteristik-kawasan-pemukiman-kumuh-di-kampung-kota-studi-kasus-kampung> (diunduh pada 23 Juli 2018), hlm. 1-15.

tersebut adalah masyarakat campuran antara penduduk setempat dengan etnis Tionghoa yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan ekonomi yang masih rendah.

Ditinjau dari segi karakteristik hunian, masih banyak permukiman penduduk yang belum layak huni. Bangunan semipermanen yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga sehingga kehidupan privasi masih sangat kurang. Masyarakatnya juga masih banyak yang menggunakan kamar mandi umum. Kondisi lingkungan yang cenderung tidak teratur serta masih belum memenuhi standar kebutuhan permukiman seperti adanya ruang terbuka hijau maupun non hijau yang dapat digunakan untuk aktivitas bersama.

Pustaka terakhir, yaitu buku karya Abdurrachman Surjomihardjo yang berjudul *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930*.<sup>24</sup> Secara garis besar buku ini membahas tentang studi sejarah sosial kota Yogyakarta. Sejak didirikan pada 1756, Kota Yogyakarta terus mengalami perkembangan. Kota Yogyakarta telah menjadi tempat berbagai golongan masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kota yang dari awal pendirian sudah bertalian dengan kedudukan raja dan para keturunannya, sehingga berakibat pada munculnya stratifikasi sosial yang mempunyai peranan penting dalam dinamika masyarakat kota.

Dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 24 Juli 1923 No. 31 yang menjelaskan batas-batas administratif Kota Yogyakarta yaitu: sebelah utara dari batas selatan Kelurahan Jambon ke tepi barat Sungai Winanga, dari batas tenggara Kelurahan Jambon melalui batas selatan Kelurahan Kutu, bagian utara jalan dari desa Blambangan ke desa Karangwaru menelusuri batas selatan Kelurahan Jombor, batas selatan Kelurahan Sendowo sampai tepi barat sungai Code, melalui batas selatan Kelurahan Demangan. Sebelah timur dari batas sebelah barat Kelurahan Demangan dan Muja-Muju menyusur batas utara Kelurahan Muja-Muju dan Semaki. Melalui batas barat Kelurahan Semaki,

---

<sup>24</sup>Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).

Warungbata dan Sarasutan menuju timur Jalan Nyutran. Kemudian dari jalan desa Tungkak menuju desa Rejokusuma, menyusur batas barat desa ke sebelah barat Sungai Code.

Sebelah selatan yaitu dari sebelah barat Sungai Code menuju batas utara Kelurahan Waja, menyusur bagian barat jalan dari Yogyakarta ke Kretek. Dari batas utara Kelurahan Krapyak sampai tepi barat Sungai Winanga. Sebelah barat dari tepi Sungai Winanga, batas kota menyusur ke batas timur kelurahan-kelurahan Padokan dan Nitipuran, yang merupakan bagian barat Sungai Winanga menuju ke bagian barat jalan dari Yogyakarta ke Camping. Selanjutnya dari batas timur Kelurahan Sutapadan ke arah timur leding Trini dan melalui batas Timur Kelurahan Kembang ke Godean dan menyusur bagian utara jalan itu ke tepi timur leding Trini, menyusur batas timur Kelurahan Trini ke tepi barat leding Trini yang terletak di batas selatan Kelurahan Jambon.

Kota Yogyakarta pada awalnya merupakan kota keraton di pedalaman yang diawasi oleh pemerintah kolonial. Terdapat dua kekuatan kepentingan, yaitu kekuatan tradisional dan kekuatan kolonial bertemu di dalamnya. Dalam buku ini, kurun waktu yang dipilih yakni pada masa akhir abad ke-19 sampai masuk awal abad ke-20. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan proses pasifikasi Hindia Belanda serta semakin mendalamnya pengaruh politik dan ekonomi kolonial ke arah pedalaman di Jawa.

Selanjutnya buku ini juga menjelaskan stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat di Yogyakarta yang sangat erat dengan kedudukan keraton dalam struktur sosial di Jawa. Sultan menduduki peringkat paling atas dari sistem pelapisan masyarakat. Urutan kedua ditempati oleh kerabat keraton atau *sentana dalem* disusul dengan urutan ketiga yaitu mereka yang bekerja pada administrasi kasultanan maupun pemerintahan yang disebut *abdi dalem* atau kaum priyayi. Urutan yang terakhir yaitu golongan wong cilik atau yang sering disebut juga dengan rakyat jelata, baik penduduk kota maupun yang ada di pedesaan. Mereka adalah golongan para pekerja yang tidak terdidik atau sedikit mendapat latihan kerja di perusahaan kecil.

Lebih mendalam buku ini juga menjelaskan latar belakang pertumbuhan ekonomi. Berawal dari terbukanya daerah pedalaman Jawa bagi lalu lintas ekonomi dunia. Perusahaan kereta api, gas, listrik, dan air minum mengubah segi fisik kota dengan jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, gedung pertemuan, asrama-asrama, dan rumah sakit. Berbagai segi perkembangan fisik kota dengan permukiman baru berpengaruh dalam cara berpikir penduduk dalam Kota Yogyakarta. Kota kerajaan yang kemudian tumbuh menjadi kota dalam situasi kolonial dengan kemudahan-kemudahan baru yang tidak terdapat dalam kota tradisional.

Terbukanya masalah-masalah yang menyangkut penggunaan tanah, tenaga kerja, dan modal yang diperlukan sebagai keseimbangan dan pembauran administrasi pemerintahan. Pasaran tenaga kerja lebih terbuka baik dari segi susunan jabatan pemerintahan maupun pada perusahaan dan industri perkebunan sehingga meluas secara horizontal dan terbatas terjadi mobilitas vertikal. Munculnya stratifikasi sosial antara golongan Eropa yang menduduki tingkatan pertama, kemudian golongan Tionghoa dan tingkatan paling bawah yaitu golongan bumiputera merupakan suatu hal penting yang muncul setelah adanya jaringan kontak intelektual.

Proses pengajaran di kota Yogyakarta lebih mendorong terjadinya kontak intelektual terutama setelah usaha yang diselenggarakan pemerintah diikuti oleh golongan masyarakat sekitarnya. Elite Indonesia yang tumbuh dari sekolah-sekolah Barat mendirikan sekolah-sekolah sendiri atau muncul sebagai pendiri organisasi politik. Sementara itu, golongan *wong cilik* semakin jelas posisinya dalam masyarakat kota. Di kemudian hari anak-anak mereka sudah mulai dimasukkan dalam sekolah-sekolah. Hal tersebut mampu membuka pandangan mereka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Skripsi ini membahas tentang proses penataan permukiman kumuh lembah Kali Code Yogyakarta pada 1983-2010. Dalam sebuah penelitian, kerangka diperlukan untuk memberikan penjelasan secara ilmiah tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Merujuk pada fokus pembahasan skripsi, maka akan dijelaskan mengenai konsep kemiskinan, permukiman kumuh, serta konsep *wong cilik*.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh manusia. Kemiskinan juga merupakan suatu yang nyata dan ada dalam masyarakat. Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pada pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.<sup>25</sup>

Meski tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh manusia sudah berkembang pesat dalam bidang pendidikan, perindustrian, ilmu pengetahuan, tetapi suatu tempat berteduh yang nyaman sederhana dengan kebebasan pribadi (*privacy*) dan perlindungan terhadap keganasan cuaca alam masih saja belum termasuk jangkauan bagi kebanyakan masyarakat. Salah satu penyebab dari keterbelakangan ini adalah masalah ledakan penduduk, sementara tanah yang seharusnya digunakan sebagai tempat untuk mendirikan rumah atau permukiman semakin sempit dan tidak lagi sanggup melayani penduduk yang semakin bertambah banyak, kota dijadikan sebagai tempat pengungsian untuk menampung penduduk.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Parsudi Suparlan, "Kemiskinan di Perkotaan" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) hlm. xi.

<sup>26</sup>Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, hlm. 60.

Masa penduduk yang menuju ke kota, menyaksikan bahwa tanah di kota telah dibagi dalam bentuk petakan yang kecil-kecil yang dapat dibeli atau disewa. Sekalipun mereka sanggup untuk membeli tetapi mereka tidak sanggup lagi untuk membangun rumah dengan alat dan keterampilan sendiri. Dari sini masalah semakin bertambah dengan arus kaum pemudik yang berbondong-bondong ke kota lebih cepat dibanding dengan kesanggupan industri untuk menampung tenaga kerja dan kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin meningkat. Sebagai akibatnya adalah orang tidur di jalanan, muncul tempat dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, permukiman liar yang menampilkan kesengsaraan manusia di kota yang sedang berkembang pesat.

Arus perpindahan penduduk yang mengalir deras ke kota tidak hanya berdampak pada masalah permukiman, tetapi limbah dari kehidupan manusia tersebut merupakan salah satu aspek yang paling gawat dan perlu diperhatikan. Salah satunya masalah pembuangan tinja manusia yang sering kali dilepas ke parit yang sama-sama digunakan oleh masyarakat. Masalah semacam ini tentu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Bagi permukiman perkotaan yang padat penduduknya, pencemaran semacam ini memang sudah menjadi hal yang lumrah dan dianggap wajar dari gaya hidup manusia.<sup>27</sup>

Munculnya kampung-kampung di perkotaan merupakan fenomena yang banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang dan sebenarnya adalah sebuah bentuk asli dari kota-kota di Indonesia. Di sisi lain, dalam kampung kota yang padat juga terdapat berbagai masalah yang selanjutnya dapat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh dan permukiman liar di dalam kampung kota tersebut. Sebutan permukiman kumuh ditujukan kepada kompleks permukiman dengan kondisi fisik dan tata ruang yang merefleksikan kemiskinan dan ketidakmampuan penghuninya. Kondisi lingkungan yang semrawut, kotor, padat serta minim dengan fasilitas umum seperti sarana untuk pembuangan limbah dan saluran air bersih.

---

<sup>27</sup>Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, hlm. 65.



Permukiman kumuh bisa menjadi bagian dari kampung di perkotaan, tetapi juga dapat berdiri sendiri menjadi permukiman liar. Liar dalam hal ini merujuk pada kenyataan bahwa rumah yang berdiri di permukiman tersebut dibangun dengan memanfaatkan secara tidak sah tanah-tanah milik negara yang semestinya daerah tersebut masuk dalam kategori larangan untuk area permukiman. Pola kehidupan permukiman kumuh biasanya memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tempat hunian yang saling berhimpitan sehingga tidak terdapat ruang kosong. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor tidak tersisanya lahan untuk penghuni permukiman tersebut melakukan aktivitas mereka dengan leluasa. Para penghuni permukiman kumuh juga memiliki gejala lapar tanah. Hal tersebut mendorong mereka untuk melakukan reklamasi tebing-tebing sungai dengan membuat patok dan mengisi ruang dalam patok tersebut yang kemudian diisi dengan sampah untuk dibangun rumah di atasnya.<sup>28</sup>

Permukiman kumuh menurut Ditjen Bangda Kemendagri adalah pemukiman dengan karakteristik sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah serta memiliki sistem sosial yang rentan. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal, lingkungan pemukiman, rumah dan fasilitas sarana prasarana di bawah standar minimal sebagai tempat untuk bermukim.<sup>29</sup>

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan

---

<sup>28</sup>Mahendra P. Utama, "Berebut Jakarta: Negara Versus Kaum Miskin Pada Awal Masa Reformasi", dalam Suyanto, ed., *Pergeseran Isu, Teori, dan Metodologi dalam Studi Kebudayaan (Bahasa, Sastra, dan Sejarah)* (Semarang: Center for Asian Studies, 2016), hlm. 217.

<sup>29</sup>Nursyahbani Raisa dan Pigawati Bitta, "Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)," *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 4, No. 2, 2015, (<https://media.neliti.com/media/publications/214472-kajian-karakteristik-kawasan-pemukiman-k.pdf> (diunduh pada 21 Agustus 2018), hlm. 1-15.

sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.<sup>30</sup> Pesatnya perkembangan permukiman di kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan urbanisasi yang mengakibatkan timbulnya pemukiman kumuh.

Wajah dari masing-masing perkampungan melarat atau penghuni gubuk liar sangat berbeda-beda dan dapat digolongkan menjadi empat golongan. Pertama, jenis-jenis kampung di sebelah dalam kota. Kedua, kelompok yang menghuni gubuk liar yang terpusat di tengah kota. Ketiga, daerah-daerah gubuk liar yang muncul di pinggiran kota dan rupanya menyerupai seperti daerah pedalaman. Keempat, kelompok yang menghuni gubuk mengambang di atas perahu atau rumah terapung.

Penduduk hidup berkelompok kemudian membangun rumah tanpa memikirkan ruang untuk fasilitas penunjang permanen. Yogyakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang menjadi salah satu tujuan urbanisasi penduduk. Proses urbanisasi menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal menetap memutuskan untuk membangun rumah di pinggiran kali/sungai. Tingkat kepadatan penduduk lama kelamaan akan menjadikan pemukiman di pinggiran kali/sungai terlihat kumuh seperti di pemukiman lembah kali Code Yogyakarta.

Tingginya tingkat urbanisasi di Yogyakarta menjadi salah satu faktor semakin banyaknya permukiman kumuh. Permukiman kumuh kali Code merupakan salah satu contoh permasalahan kota yang harus segera mendapat perhatian dari pemerintah. Menghindari dampak buruk dari kali Code yang sewaktu-waktu bisa meluap akibat banjir lahar dingin atau banjir saat musim

---

<sup>30</sup>Fitria, Niken dan Setiawan Rulli, “ Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat”, *Jurnal Teknik POMITS*, Vol. 3, No. 2, 2104, (<https://media.neliti.com/media/publications/194626-ID-identifikasi-karakteristik-lingkungan-pe.pdf> (diunduh pada 23 Juli 2018), hlm. 1-5.

penghujan, normalisasi kali Code adalah solusi yang akan dilakukan pemerintah Yogyakarta untuk membebaskan Code dari permukiman penduduk. Namun demikian, Romo Mangunwijaya mengusulkan ide bahwa Code tidak perlu digusur tetapi dilakukan penataan permukiman. Penataan adalah proses, cara atau perbuatan menata.<sup>31</sup> Setelah mendapat izin dari keuskupan dan pemerintah Yogyakarta, Romo Mangunwijaya dibantu masyarakat yang tinggal di Code mulai melakukan penataan dan membangun permukiman wong cilik di lembah Kali Code.

Permukiman liar adalah suatu kawasan pemukiman yang dibangun pada lahan kosong atau liar di kota yang lahan permukiman biasanya milik swasta atau pemerintah tanpa hak legal terhadap lahan dan atau izin dari pemilik lahan. Pemukiman liar biasanya didiami oleh orang-orang yang berada pada kelas ekonomi rendah dan tidak memiliki akses terhadap pemilikan lahan tetap.

Ada tiga karakteristik yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan pemukiman liar yaitu karakteristik fisik yang ditandai dengan infrastruktur dan pelayanan baik jaringan maupun sosial yang tidak memadai atau bahkan berada pada tingkat minimum. Selain itu karakter sosial yang ditandai dengan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rendah. Terakhir yaitu karakteristik legal, merupakan karakteristik kunci yang menggambarkan pemukiman liar yaitu tidak adanya hak milik terhadap lahan yang bisa digunakan untuk mendirikan rumah.<sup>32</sup>

Wajah dari masing-masing kampung melarat dan kelompok gubuk-gubuk liar tersebut sangat berbeda-beda. Tempat tersebut umumnya terdiri dari gubuk-gubuk lapuk tanpa fasilitas pokok yang mempermudah kehidupan, seperti penerangan listrik, air ledeng, sanitasi dan jalan-jalan yang wajar. Secara teknis, penghuni-penghuni liar telah menyerobot tanah dan mendirikan tempat tinggal

---

<sup>31</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diunduh pada 8 Februari 2019.

<sup>32</sup>Shafrida, Aina, "Proses Spasial Pemukiman Liar (Squatter) di Sempadan Rel Kereta Api Kota Semarang" (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2014).

yang secara melanggar hukum serta melanggar hak-hak atas milik yang merupakan salah satu masalah sulit bagi pemerintah.<sup>33</sup>

Selanjutnya, *wong cilik* adalah sebutan atau istilah yang digunakan untuk membedakan status sosial dalam masyarakat Jawa.<sup>34</sup> Penggunaan istilah *wong cilik* selalu dikontraskan dengan istilah priyayi. Masyarakat yang tergolong dalam kelompok *wong cilik* adalah sebagian besar petani, petani gurem, para pekerja kasar, pedagang kecil, buruh kecil yang masa kelompok tersebut kebanyakan adalah lapisan masyarakat kelas bawah. Sementara itu, Franz Magnis Suseno menjelaskan perbedaan arti *wong cilik* dan orang miskin. Orang miskin termasuk orang kecil, sedangkan orang kecil hidupnya sederhana tetapi belum tentu miskin.<sup>35</sup> Dapat disimpulkan bahwa *wong cilik* belum tentu miskin, mereka adalah golongan kelompok *powerless* yaitu mereka tidak memiliki kuasa atau kelompok yang lemah dan tidak berdaya sehingga mudah untuk dieksploitasi dan dimiskinkan.

Fakta mengenai daerah tempat tinggal orang-orang yang memiliki penghasilan rendah adalah mereka menunjukkan jiwa bersatu, kepercayaan pada diri sendiri, dan kestabilan yang kuat. Mereka rela bekerja sama untuk menanggulangi kesulitan yang mereka atau kelompok mereka hadapi. Dilihat dari banyak kasus mereka telah mengorganisasi diri untuk menyelamatkan tempat tinggal dan masyarakat atau kelompoknya. Ada satu sikap informal dan hubungan bertetangga yang baik, yang mendukung serta meringankan beban bersama. Bagi negara berkembang, orang-orang seperti mereka merupakan dinamit politik. Usaha untuk mengusir mereka membangkitkan semangat dan rasa sentimen yang kuat. Tidak sedikit juga terkadang telah menimbulkan pemberontakan dari mereka

---

<sup>33</sup>Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, hlm. 2.

<sup>34</sup>"Wong Cilik dan Status Sosialnya Dalam Konteks Indonesia", *Jurnal Pelita Zaman* Vol. 13 No. 1 (Solo: Yayasan Lembaga Sabda, 1998).

<sup>35</sup>Franz Magnis Suseno, "*Beriman Dalam Masyarakat: Butir-Butir Teologi Kontekstual*" (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hlm. 29.

dan akan menciptakan sebuah organisasi yang lebih kuat demi kepentingan bersama.<sup>36</sup>

Kota adalah gelanggang utama tempat para pemain bertemu, identitas dibentuk, dan memori kolektif dipersandingkan dan dipertandingkan. Kota adalah saksi yang tidak sepenuhnya bisu atas pertarungan yang telah terjadi di dalam dindingnya. Kota menjadi subjek kekuasaan. Jalan, bangunan dan desain ruang yang menuturkan kisah-kisah menarik, kompleks dan penuh, dengan tantangan bagaimana mereka dipaksa memainkan peran protagonis atau antagonis oleh tangan para penguasa yang saling berebut untuk menorehkan narasi di atas teks kehidupan urban.<sup>37</sup>

Namun demikian, pengembangan kota sering kali lebih menekankan pada aspek fisik, yaitu lebih mengutamakan siapa yang mempunyai kuasa dan modal. Seperti contoh, pembangunan pusat perbelanjaan, pusat perkantoran serta kompleks perumahan mewah yang semuanya selaras dengan kepentingan golongan atas dan menengah. Sebagai akibatnya, kelompok marjinal seperti pedagang asongan, tukang becak, Pedagang Kaki Lima (PKL), buruh pabrik, pengamen dan pemulung sama sekali tidak tersentuh bahkan cenderung diabaikan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984) hlm. 113.

<sup>37</sup>Abidin Kusno, *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Suharto* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009). hlm. xxi.

<sup>38</sup>Mahendra P. Utama, "Berebut Jakarta: Negara Versus Kaum Miskin Pada Awal Masa Reformasi", hlm. 215.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yakni suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau.<sup>39</sup> Metode sejarah kritis adalah sekumpulan prinsip serta aturan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis, kemudian disajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya ke dalam bentuk tulisan sejarah ilmiah.<sup>40</sup> Menurut Gottschalk, metode penelitian sejarah kritis terdiri dari empat tahapan pokok yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan pengumpulan dan pemilihan sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kritik adalah proses menguji sumber secara kritis dengan menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik dan untuk mendapatkan fakta yang bisa dipercaya. Interpretasi merupakan suatu penyimpulan kesaksian dan penafsiran hubungan antarfakta. Historiografi adalah penyusunan fakta-fakta menjadi tulisan sejarah.<sup>41</sup>

Sumber sejarah yang digunakan dalam skripsi ini dikategorikan menjadi dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan untuk menulis skripsi ini berasal dari koran, majalah serta surat-surat yang ditulis Romo Mangunwijaya. Sumber primer berupa koran yang penulis gunakan yakni, *Kedaulatan Rakyat*, *Harian Kompas*, *Suara Merdeka*, *Pos Kota*, *Suara Pembaruan* dan *Suara Karya*. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi Code pada 1980. Dalam sumber tersebut juga dijelaskan bagaimana awal mula rencana normalisasi Code akan dilakukan yang kemudian pada tahun 1983 muncul Romo Mangunwijaya yang gigih memperjuangkan Code agar tidak digusur. Penulis juga menemukan sumber berupa foto-foto Romo Mangunwijaya saat mendampingi masyarakat Code dan

---

<sup>39</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

<sup>40</sup>Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Idayu, 1978), hlm. 11.

<sup>41</sup>Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, hlm. 36.

foto anak-anak yang tinggal di permukiman Code yang dapat memperkuat fakta-fakta sejarah.

Selain surat kabar, penulis juga menggunakan sumber primer lain, yakni artikel dari majalah *Eksponen* yang menceritakan tentang alasan-alasan dari pemerintah Yogyakarta akan melakukan normalisasi Code ditambah dengan isu-isu yang membahas Romo Mangunwijaya. Penulis juga menggunakan artikel yang dimuat dalam *Wawasan*. Di dalamnya bercerita tentang ancaman Romo Mangunwijaya akan melakukan aksi mogok makan apabila rencana pemerintah melakukan pengusuran Code tetap dilakukan.

Untuk melengkapi atau menambahkan keterangan-keterangan yang tidak terdapat di dalam sumber primer, maka penulis menggunakan sumber sekunder berupa literatur-literatur seperti buku-buku terbitan yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber sekunder yang lain didapatkan melalui proses penelusuran internet yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diangkat dan dikaji karena akan lebih memudahkan penulis menjadi lebih ringkas dan efektif.

Selain sumber tertulis, penulis juga menggunakan sumber lisan yang diperoleh dengan wawancara, baik dengan tokoh yang terlibat langsung maupun orang-orang yang memiliki keterkaitan topik skripsi yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan para informan yang terdiri atas, masyarakat penghuni permukiman lembah Code, pendamping masyarakat Code serta penggiat Pemerti Code.

Setelah mendapatkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji, langkah selanjutnya yaitu dilakukan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern memiliki tujuan untuk memastikan kembali keotentikan atau keaslian sumber. Keaslian sumber sendiri merujuk pada dua kriteria. Pertama, yaitu sumber tersebut belum dikupas dan belum diterjemahkan atau dengan kata lain masih dalam bentuk sebagaimana aslinya ia keluar dari tangan penulis atau pengarangnya. Kedua, sumber itu memiliki informasi paling awal yang dapat diperoleh. Sumber-sumber yang berusaha menyajikan informasi bukan dari orang pertama atau tangan pertama dikategorikan sebagai sumber sekunder. Sumber

tersebut berguna untuk membantu memberikan pemahaman kepada penulis terkait latar belakang suatu subjek, memberikan petunjuk bagi penelusuran bibliografis, memperoleh kutipan yang sulit atau tidak diperoleh dari sumber primer, serta membantu mendapatkan interpretasi yang lebih baik dari suatu masalah.<sup>42</sup>

Kritik intern memiliki tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang dapat dipercaya. Kritik intern dilakukan terutama terhadap laporan media massa cetak atau *online*. Menurut Gottschalk, laporan atau berita yang dimuat di dalam surat kabar memuat fakta yang “bisa jadi paling dapat dipercaya”, karena “jarak waktu antara peristiwa dan rekamannya biasanya tidak terlalu lama”.<sup>43</sup> Publikasinya yang luas juga merupakan salah satu keuntungan kredibilitas karena dapat memperkecil peluang untuk menyampaikan suatu kebohongan.<sup>44</sup> Akan tetapi, diperlukan kehati-hatian dalam menghadapi berbagai laporan atau berita dalam surat kabar, karena terkadang terjadi pemutarbalikan fakta, mengabaikan fakta penting, dan penggambaran kejadian secara berlebihan demi menarik perhatian pembaca.<sup>45</sup>

Hal yang sama berlaku juga pada sumber yang berasal dari artikel dan laporan atau berita di berbagai media *online*. Penjelasan sumber online yang digunakan artikel penelitian tentu tidak asal tulis. Akan tetapi, diperlukan juga kehati-hatian dalam memilih sumber yang dipublikasikan secara *online* tidak sedikit yang berasal dari blog dengan mengabaikan berbagai kaidah-kaidah yang digunakan dalam penulisan ilmiah, misal tidak mencantumkan sumber rujukan. Kenyataan bahwa geger tentang pemukiman di wilayah Kali Code yang melibatkan seorang pastur, arsitektur sekaligus budayawan yang terkenal dengan novel-novelnya dan kegigihannya dalam membela masyarakat pemukiman Code dari pengusuran memang sudah ramai dibicarakan oleh berbagai media cetak

---

<sup>42</sup>Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 78

<sup>43</sup>Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 64

<sup>44</sup>Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 110-113.

<sup>45</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 108.



maupun *online* membuat peristiwa tersebut banyak dikaji. Kondisi tersebut tentu dapat membantu proses kritik intern dalam membandingkan dengan laporan atau berita di media massa cetak dan *online* dengan hasil kajian yang baik dan sudah layak untuk dipublikasikan.

Tahap berikutnya adalah interpretasi fakta, sebuah langkah dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara maupun informasi yang dimuat di dalam media massa dengan cara menyeleksi, menyusun, memberi atau mengurangi penekanan serta menata fakta-fakta yang ada ke dalam urutan tertentu.<sup>46</sup> Proses menyeleksi fakta dilakukan dengan memilih fakta-fakta yang relevan dengan topik yang akan dikaji, kemudian dihadapkan pada pernyataan-pernyataan penelitian serta kerangka teori yang telah dibangun. Fakta yang sudah didapatkan kemudian dihubungkan dengan bantuan imajinasi penulis agar penulis mendapatkan suatu gambaran yang kompleks dan utuh tentang kajian atau peristiwa sejarah. Selain itu, untuk mendapatkan penafsiran yang lebih baik diperlukan *historical-mindedness*, sehingga fenomena yang telah dikaji dapat dilihat sesuai dengan suasana kesejarahan dan kebudayaan pada suatu masa.<sup>47</sup>

Historiografi adalah langkah terakhir dalam metode sejarah. Tahap ini merupakan tahap rekonstruksi penulis dalam mengolah setiap fakta-fakta yang telah diperoleh, diinterpretasi serta telah melalui tahap pengujian sumber menjadi sebuah tulisan sejarah yang analitis dan menyeluruh. Historiografi diarahkan guna menyajikan deskripsi tentang peristiwa dan proses yang akan dikaji. Deskripsi tentang peristiwa ini berkenaan dengan usaha untuk menjawab berbagai pertanyaan apa, siapa, kapan, dan dimana. Deskripsi tentang proses bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana dan akan menjadi apa.<sup>48</sup> Di

---

<sup>46</sup>Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 144.

<sup>47</sup>Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 70.

<sup>48</sup>Taufik Abdullah, "Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi", dalam Taufik Abdullah dan Abdurachman Surjomihardjo, ed., *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. xiv.

dalam tahap ini penulis berharap dapat menyajikan tulisan secara ilmiah, dengan menggunakan bahasa yang baik, benar serta mudah dipahami oleh pembaca.

### **G.Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan, penulis menyajikan pokok-pokok yang akan dibahas ke dalam sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup penelitian baik lingkup spasial, temporal maupun keilmuan. Bab ini juga mencakup tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Lembah Code dan Masyarakat Urban di Yogyakarta. Bab ini menjelaskan perkembangan serta kemajuan Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan. Perkembangan Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan sampai dengan 1983, yang meliputi perubahan fisik kota, kemajuan kota Yogyakarta, urbanisasi dan kondisi masyarakat urban Yogyakarta serta awal mula munculnya permukiman kumuh di lembah Kali Code

Bab III Penataan Permukiman Kumuh Lembah Kali Code, 1983-1986. Bab ini menjelaskan awal munculnya kebijakan pemerintah Yogyakarta melakukan normalisasi Kali Code. Selain itu akan dijelaskan munculnya Romo Mangunwijaya sebagai pembela masyarakat yang tinggal di permukiman Code dari penggusuran. Dilanjutkan dengan penataan permukiman kumuh di lembah Kali Code beserta dengan faktor pendukung dan penghambat saat proses penataan permukiman kumuh lembah Kali Code oleh Romo Mangunwijaya.

Bab IV Wajah Baru Pemukiman Lembah Code, 1986-2010. Bab ini menjelaskan bagaimana kondisi pemukiman lembah Code setelah pendekatan dan penataan oleh Romo Mangunwijaya pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2010 di Code berdiri sebuah organisasi yang Pemerti Code yang merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat yang tinggal di Code sebagai bentuk untuk menjaga permukiman Code agar tetap nyaman sekaligus menjaga Kali Code agar tetap bersih. Selain itu dijelaskan apa saja kegiatan yang

telah dilakukan oleh Pemerti Code untuk mencapai tujuannya serta perubahan-perubahan yang terjadi di permukiman Kali Code.

Bab VI adalah simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.